

Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Sektor Ekonomi Digital di Indonesia

Rizki Olivia Putri¹ dan Dina W. Kariodimedjo²

INTISARI

Perkembangan sektor ekonomi digital yang semakin pesat di Indonesia memunculkan persaingan usaha model baru yang secara kompleks mempertemukan antara penjual, *platform*, dan pembeli. Struktur pasar yang *multi-sided* menyebabkan munculnya perilaku anti persaingan usaha yang sangat tersembunyi. Seiring dengan pesatnya perkembangan sektor ekonomi digital di Indonesia, selain memerlukan pengaturan lebih lanjut di dalam regulasi terkait, juga diperlukan upaya pengawasan dan penegakan hukum oleh KPPU selaku otoritas persaingan usaha. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pengaturan yang komprehensif mengenai hukum persaingan usaha dalam sektor ekonomi digital di Indonesia serta mengetahui peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada sektor ekonomi digital.

Penelitian ini bersifat normatif empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen dan sumber kepustakaan serta data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dan narasumber ahli. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan dengan metode deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 5 Tahun 1999 sangat urgen untuk diamandemen sebagai upaya jangka panjang guna menciptakan peraturan hukum yang komprehensif serta menjamin kepastian hukum. Selanjutnya, sebagai upaya jangka pendek dan menengah, penguatan kewenangan KPPU dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap sektor ekonomi digital secara paralel perlu ditingkatkan. KPPU sebagai otoritas persaingan usaha mengamati dan mengumpulkan data terkait pelaku usaha di sektor ekonomi digital beserta bagaimanakah proses atau cara kerja yang diterapkan. Selain itu, KPPU juga melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha sektor ekonomi digital dan berkoordinasi dengan instansi/lembaga lain serta menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan masyarakat untuk melakukan penelitian terkait ekonomi digital guna pengembangan ilmu pengetahuan.

Kata Kunci: ekonomi digital, persaingan usaha, pengawasan, urgensi

¹ Mahasiswa Program Studi Sarjana, Departemen Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

² Dosen Pembimbing Skripsi, Departemen Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

The Role of the Indonesia Competition Commission (KPPU) in the Supervision and Enforcement of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition in the Digital Economy Sector in Indonesia

Rizki Olivia Putri¹ and Dina W. Kariodimedjo²

ABSTRACT

The rapid development of the digital economy sector in Indonesia has led to a new model of business competition that complexly brings together sellers, platforms, and buyers. The multi-sided market structure causes the emergence of very hidden anti-competitive behavior. Along with the rapid development of the digital economy sector in Indonesia, in addition to requiring further regulation in the relevant regulations, it also requires supervision and law enforcement efforts by Indonesian Competition Commission (KPPU) as the business competition authority. This study aims to analyze the urgency of comprehensive regulation of business competition law in the digital economy sector in Indonesia and to determine the role of the KPPU in conducting supervision and law enforcement of monopolistic practices and unfair business competition in the digital economy sector.

This research is normative empirical. The data used in this research are secondary data obtained from document studies and literature sources and primary data obtained from interviews with respondents and expert informant. The data obtained is analyzed qualitatively and presented with descriptive method.

The results show that Law Number 5 of 1999 is urgent to be amended as a long-term effort to create comprehensive legal regulations and ensure legal certainty. Furthermore, as a short and medium term effort, the strengthening of KPPU's authority in supervision and law enforcement of the digital economy sector in parallel needs to be improved. KPPU as a business competition authority observes and collects data related to business actors in the digital economy sector along with the processes or ways of working applied. In addition, KPPU also conducts socialization to business actors in the digital economy sector and coordinates with other parties/institutions and collaborates with universities and the community to conduct research related to the digital economy for scientific development.

Keywords: *digital economy, business competition, supervision, urgency*

¹ Undergraduate Student of Business Law Department, Faculty of Law Gadjah Mada University.

² Undergraduate Thesis Supervisor, Business Law Department, Faculty of Law Gadjah Mada University.